



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BPKAD KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016 - 2021**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312
Telp. (0284) 321029 Fax. (0284) 321287
email : bpkadkabpemalang@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050/ 603 / TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2016 - 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41);
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 April 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG




W JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661224 199203 1 005

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah setiap saat perlu di evaluasi dan disinkronkan dengan tujuan, sasaran dan indikator perangkat daerah. Melalui tahapan evaluasi dan review atas dokumen pendukung SAKIP pada Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang, Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Kabupaten Pemalang mengalami perubahan, disesuaikan dengan bobot tugas pokok dan fungsi BPKAD, tujuan, sasaran, cakupan indikator serta dalam rangka mengakomodir isu-isu strategis terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan pertimbangan segala hal tersebut maka pemanfaatan aset daerah disarankan untuk menjadi bagian dari IKU BPKAD Kabupaten Pemalang. Dengan tujuan mengakomodir saran masukkan tersebut maka disusunlah revisi renstra BPKAD Kabupaten Pemalang 2016 – 2021.

Selain mengakomodir perubahan IKU BPKAD, revisi renstra ini dilakukan juga untuk mengakomodir penyesuaian kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020. Terdapat beberapa kegiatan yang harus dialihkan ke program yang lain karena antara output kegiatan dan outcome program tidak sesuai. Ketidaksiesuaian ini menimbulkan kerumitan dalam menyusun mapping kegiatan yang mendukung program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal tersebut yang menjadi alasan kedua mengapa perlu dilaksanakan revisi atas renstra BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021.

Pemalang, 8 Juni 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



W. JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Utama Muda

NIP. 19661224 1992031 005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1. Maksud	7
1.3.2. Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD KABUPATEN PEMALANG	11
2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi BPKAD.	11
2.1.1. Tugas	11
2.1.2. Fungsi	11
2.1.3. Struktur	11
2.2. Sumber Daya BPKAD	22
2.2.1. Sumber Daya Manusia BPKAD	22
2.2.2. Perlengkapan	24
2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD	41

BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	44
3.1	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPKAD.....	44
3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	51
3.3.	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	55
3.3.1.	Telaahan Renstra K/L	55
3.3.2.	Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah	57
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (LHS)..	66
3.4.1.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	66
3.4.2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	66
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis.....	67
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	69
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD.....	69
4.1.1.	Tujuan	69
4.1.2.	Sasaran	69
4.2.	Strategi dan Kebijakan BPKAD	71
4.2.1.	Strategi BPKAD	71
4.2.2.	Kebijakan BPKAD	72

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	75
	5.1. Rencana Program dan Kegiatan	75
	5.2. Indikator Kinerja	80
	5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	84
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	115
BAB VII	PENUTUP	117

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel : 2.2 Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Golongan Per 28 Februari 2017	23
Tabel : 2.3 Distribusi Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 28 Februari 2017	23
Tabel : 2.4 Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang Berdasarkan Diklat Struktural Per 28 Februari 2017	24
Tabel : 2.5 Sarana dan Prasarana (Inventaris) BPKAD Kabupaten Pemalang Per 28 Februari 2017....	24
Tabel : 2.6 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang	29
Tabel : 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2015.....	31
Tabel : 2.8 Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPKAD Pemalang terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L.....	43
Tabel : 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Pemalang	47
Tabel : 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil	

	Kepala Daerah	54
Tabel : 3.3	Permasalahan Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya	60
Tabel : 3.4	Permasalahan Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang berdasarkan sasaran Renstra SKPD Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya	63
Tabel : 3.5	Permasalahan Pelayanan BPKAD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya	66
Tabel : 3.6	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	68
Tabel : 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	70
Tabel : 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	72
Tabel : 5.1	Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Indikator Program BPKAD	81
Tabel 5.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	85
Tabel : 6.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ...	116

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010	2
Gambar 1.2. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD (Lampiran IV Permendagri No. 54 Tahun 2010)	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Pematang (Perbup No.69 Tahun 2016)	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem Akuntabilitas. Pemerintahan dapat berjalan baik dengan akuntabilitas yang dapat diandalkan. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun sebagai dokumen yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang disusun sebagai tolok ukur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun waktu lima tahun yaitu 2016 sampai dengan 2021. Renstra BPKAD Kabupaten Pemalang mengacu pada program yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan di BPKAD dengan tujuan meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Pemalang dengan basis Teknologi Informasi.

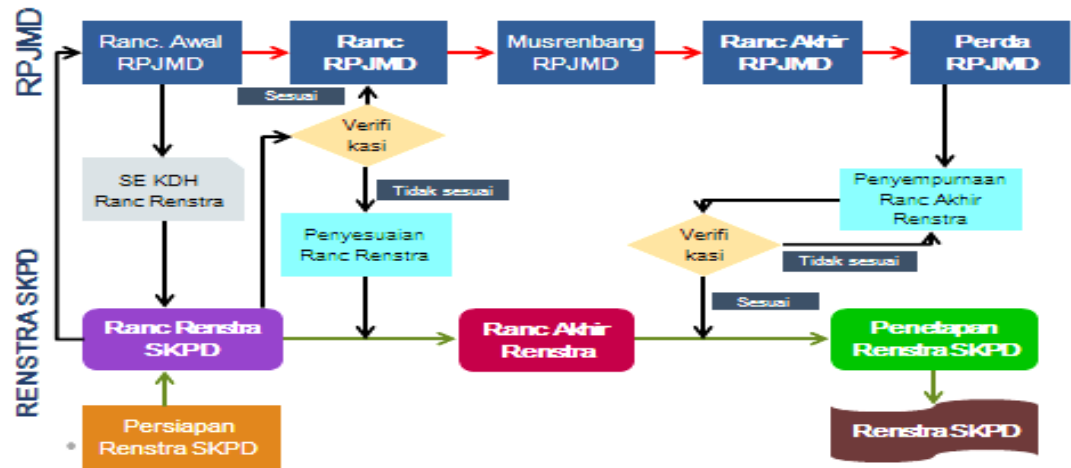
Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis

Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

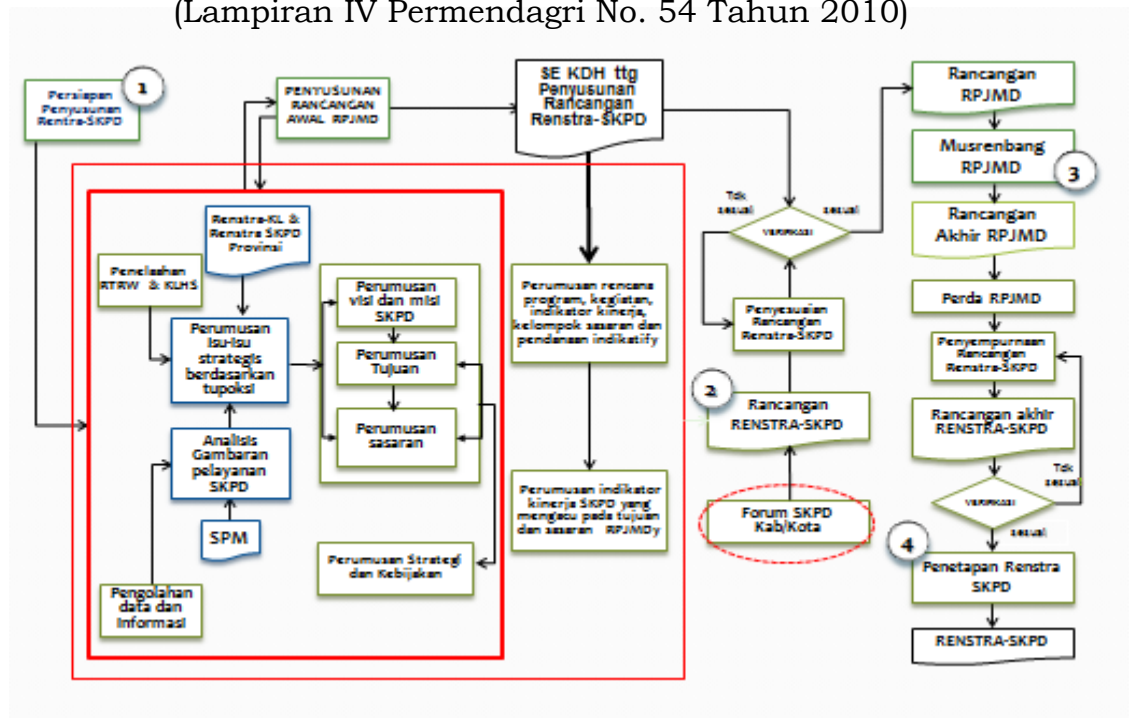
Tahapan penyusunan Renstra BPKAD mengacu pada Permendagri 54 Tahun 2010 (sebagaimana yang tercantum dalam gambar 1.1) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan peran dan fungsi BPKAD Kabupaten Pematang Jaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sampai dengan Tahun 2019, Renstra BPKAD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021 telah mengalami tiga kali perubahan. Perubahan Pertama dilakukan pada awal tahun 2017, ketika Renstra harus disesuaikan dengan nomenklatur pada Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan kedua dilakukan pada tahun 2018, ketika RPJMD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021 dievaluasi dan rencananya akan direvisi sehingga perlu ditambahkan adanya indikator bagi Kepala BPKAD (pejabat eselon II) sebagai IKU BPKAD. Perubahan ketiga dilakukan untuk menindaklanjuti hasil review dokumen SAKIP oleh Inspektorat yang menyatakan bahwa indikator “ Hasil opini BPK RI atas Laporan Keuangan “ kurang tepat sebagai indikator BPKAD. Karena capaian indikator tersebut dilakukan oleh semua perangkat daerah, tidak hanya BPKAD. Selain indikator tersebut, terdapat revisi atas IKU BPKAD yaitu “Penatausahaan Aset Daerah yang memadai”. Kata memadai menjadi kurang tepat karena tidak dapat terukur secara pasti. Sedangkan penatausahaan aset sendiri merupakan indikator yang sangat teknis yang lebih tepat dijadikan indikator bagi pejabat eselon IV sehingga tidak dapat mewakili tugas Kepala BPKAD sebagai pengampu kebijakan di BPKAD Kabupaten Pematang Jaya

Gambar 1.1.
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010



Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra SKPD (Lampiran IV Permendagri No. 54 Tahun 2010)



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41);
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2016-2021. Adapun maksud penyusunan renstra BPKAD adalah :

- a. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan BPKAD Kabupaten Pematang Jaya dalam lima tahun mendatang dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan tujuan dalam RPJMD.
- c. Sebagai titik awal dalam melakukan pengukuran kinerja BPKAD Kabupaten Pematang Jaya sebagai Perangkat Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- d. Sebagai salah satu media yang dapat digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur dalam pertanggungjawaban serta penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya serta Peraturan Bupati Pematang Jaya nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya, adalah :

- a. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan oleh BPKAD Kabupaten Pematang Jaya sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- c. Menterjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Pematang Jaya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang

akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;

- e. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD KABUPATEN PEMALANG

- 1.5. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD
- 1.6. Sumber Daya BPKAD
- 1.7. Kinerja Pelayanan BPKAD
- 1.8. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD
- 4.2. Strategi dan Kebijakan BPKAD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

5.2. Indikator Kinerja

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPKAD KABUPATEN PEMALANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang maka BPKAD merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan.

2.1.2. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan diatas BPKAD Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

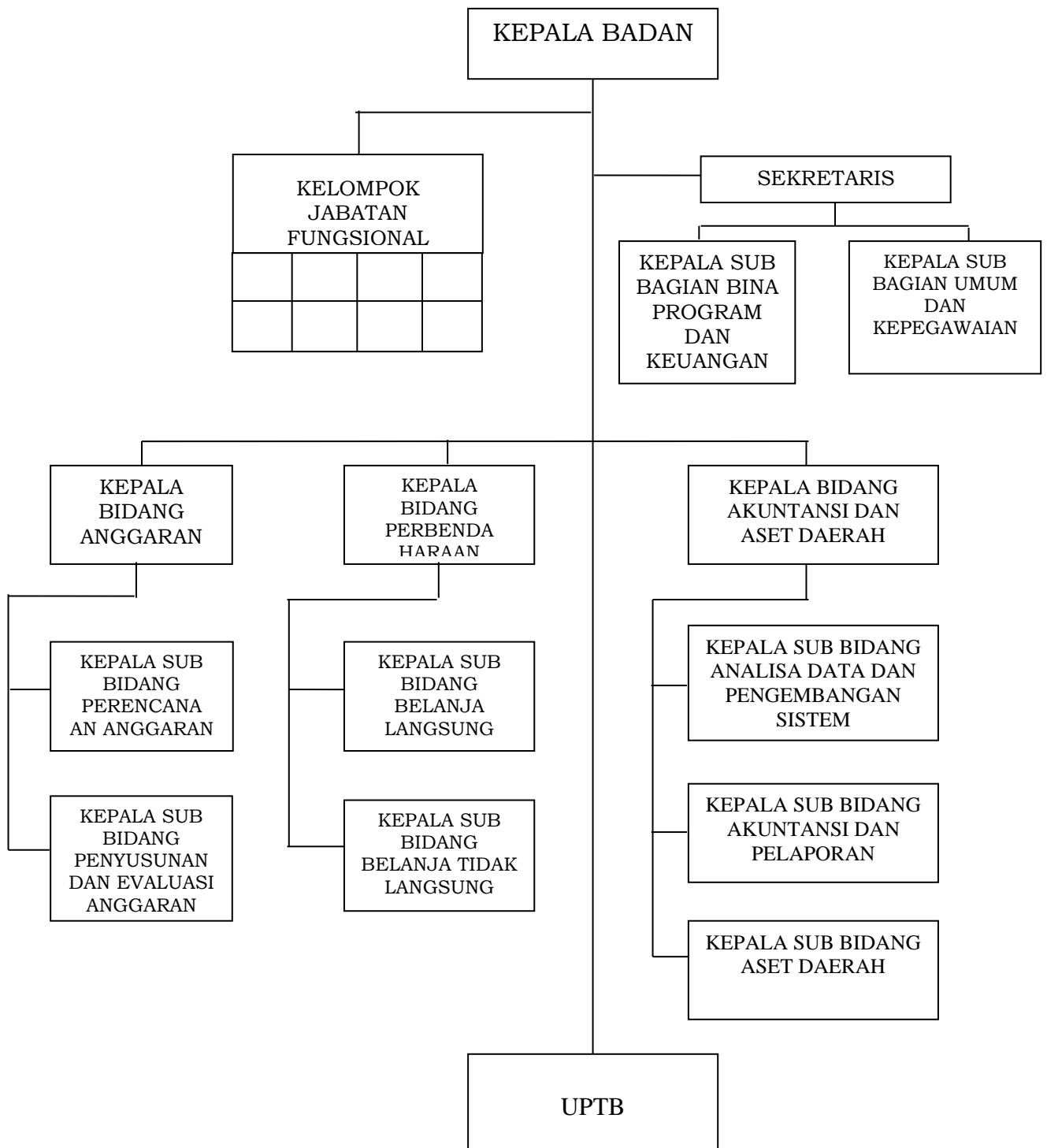
- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang terdiri dari Kepala BPKAD yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang membawahi Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang

Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Aset Daerah. Bagan struktur organisasi BPKAD Kabupaten Pemalang sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat dilihat sebagaimana pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Pemalang



Sebagaimana Gambar 2.1 diatas, masing-masing unsur dari organisasi BPKAD Kabupaten Pematang Jaya memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretaris, mempunyai tugas pokok dan fungsi;

- a) Merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b) Mengkoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) penunjang urusan pemerintahan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c) Menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d) Menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- e) Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik dari seluruh bidang/subbidang sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
- f) Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan;
- g) Menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa

- guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- h) Menkoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - i) Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - j) Mengkoordinasikan penyusunan laporan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- Sub Bagian Bina Program dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun program dan kegiatan Bidang Anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b) Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Anggaran sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Memverifikasi konsep rancangan kebijakan umum anggaran, perubahan anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar pembuatan Reperda APBD dan Perubahan APBD;
- d) Memverifikasi konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Renstra BPKAD 2016 - 2021

(APBD) dan perubahan APBD, rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD serta rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran;

- e) Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD kepada Organisasi Perangkat daerah guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Memverifikasi proses persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Surat Penyediaan Dana untuk proses registrasi sebagai pedoman pelaksanaan anggaran;
- g) Menyusun rancangan inovasi Bidang Anggaran berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Anggaran sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Bidang Anggaran membawahi dua Sub Bidang yaitu :

- Sub Bidang Perencanaan Anggaran
- Sub Bidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran

3. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a) Merencanakan program dan kegiatan pada Bidang Perbendaharaan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b) Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Perbendaharaan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Menyelenggarakan program dan kegiatan Sub Bidang Belanja Langsung dan Sub Bidang Belanja Tidak Langsung sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
- d) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan administrasi meliputi gaji, tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru non sertifikasi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah guna terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- e) Memverifikasi konsep rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
- f) Mengatur ketersediaan dana Rekening Kas Umum Daerah sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g) Menyusun rancangan inovasi Bidang Perbendaharaan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu :

- Sub Bidang Belanja Langsung
- Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

4. Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a) Merencanakan program dan kegiatan pada Bidang Akuntansi dan Aset Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b) Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Akuntansi dan Aset Daerah sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Menyelenggarakan program dan kegiatan sub bidang analisa dan pengembangan sistem, sub bidang akuntansi dan pelaporan dan sub bidang aset daerah dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Memverifikasi konsep rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan konsolidasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas;
- e) Menyelenggarakan kegiatan penyusunan laporan

keuangan gabungan wilayah tugas pembantuan dan urusan bersama Kabupaten Pemalang sebagai dasar pertanggungjawaban pendanaan pelaksanaan tugas pembantuan dan urusan bersama;

- f) Menyelenggarakan fasilitasi dan bimbingan teknis keuangan daerah sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah guna peningkatan sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah;
- g) Menyusun konsep Keputusan Bupati dan konsep pengesahan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan permohonan Organisasi Perangkat Daerah pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna tertib administrasi;
- h) Menyelenggarakan kegiatan pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap barang-barang milik daerah sesuai prosedur pengelolaan barang milik daerah guna tertib pengelolaan barang milik daerah;
- i) Menyusun rancangan inovasi Bidang Akuntansi dan Aset Daerah berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- k) Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan Aset Daerah sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- l) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan Aset Daerah secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah membawahi 3 (Tiga)

Sub Bidang yaitu :

- Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- Sub Bidang Aset Daerah
- Sub Bidang Analisa Data dan Pengembangan Sistem

5. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

BPKAD belum mempunyai Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Pembentukan UPTB, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan. JFU di BPKAD hanya terdiri dari 1 (satu) orang pranata komputer yang ditugaskan pada Bidang Akuntansi dan Aset Daerah untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah berbasis IT.

2.2. Sumber Daya BPKAD

2.2.1. Sumber Daya Manusia di BPKAD

Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya pada bulan Februari 2017 didukung oleh 53 personil dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2.2, 2.3 dan 2.4 di bawah ini :

Tabel : 2.2

Jumlah Pegawai BPKAD Kabupaten Pematang Jaya
Berdasarkan Tingkat Golongan
Per 28 Juni 2019

No	Uraian	Golongan				Jml
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	-	2	13	1	16
3.	Bidang Anggaran	-	-	8	2	10
4.	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah	-	1	11	3	15
5.	Bidang Perbendaharaan	-	1	9	2	12
	Jumlah	-	4	41	9	54

Tabel : 2.3
Distribusi Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Per 28 Juni 9

No	Uraian	SLTP	SLTA	DIII	S-1	S-2	Jml
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretariat	1	4	-	8	3	16
3.	Bidang Anggaran	-	4	-	2	4	10
4.	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah	-	3	-	8	4	15
5.	Bidang Perbendaharaan	-	4	2	4	2	12
	Jumlah	1	15	2	22	14	54

Tabel : 2.4
Pegawai BPKAD Kabupaten Pemalang
Berdasarkan Diklat Struktural
Per 28 Juni 2019

No	Uraian	Jumlah
1.	SPAMEN/ Diklatpim II	1
2.	SPAMA/ Diklatpim III	4
3.	ADUMLA	-
4.	ADUM/ Diklatpim IV	8
	Jumlah	13

2.2.2. Perlengkapan

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang memiliki sarana dan prasarana yang merupakan faktor pendukung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan prasarana (Inventaris) yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dapat dirinci sebagaimana pada Tabel 2.5 dibawah :

Tabel : 2.5
Sarana dan Prasarana (Inventaris) BPKAD
Kabupaten Pemalang
Per 28 Juni 2019

No	Uraian	Jumlah
1.	Portable Generating Set	1 Unit
2.	Kendaraan Roda-4	8 Unit
3.	Kendaraan Roda-2	29 Unit
4.	Gerobak Dorong	2 Unit
5.	Mesin ketik manual portable	2 Unit
6.	Mesin Ketik Manual Longewagen	1 Unit

No	Uraian	Jumlah
7.	Mesin Absensi	1 Unit
8.	Mesin foto copy	1 Unit
9.	Lemari besi	4 Unit
10.	Rak Besi/Metal	1 Unit
11.	Filling Besi/Metal	55 Unit
12.	Brankas	8 Unit
13.	Lemari Kaca	6 Unit
14.	Lemari Kayu	10 Unit
15.	Alat Penghancur Kertas	11 Unit
16.	Papan Nama Instansi	2 Unit
17.	LCD	1 Unit
18.	Kursi Besi/Metal	4 Unit
19.	Meja Rapat	13 Unit
20.	Kursi Rapat	70 Unit
21.	Kursi Putar	8 Unit
22.	Kursi Tamu	1 Unit
23.	Lemari arsip untuk arsip dinamis	4 Unit
24.	Meja Komputer	19 Unit
25.	Meja Biro	3 Unit
26.	Mesin Penghisap Debu	2 Unit
27.	Lemari Es	3 Unit
28.	AC Unit	11 Unit
29.	AC Split	20 Unit
30.	Exhause Fan	1 Unit
31.	Radio	1 Unit
32.	Televisi	12 Unit
33.	Cesete Recorder	2 Unit
34.	Sound System	2 Unit
35.	Microphone	1 Unit
36.	Tangga Aluminium	1 Unit
37.	Dispenser	6 Unit
38.	Alat Pemadam Portable	8 Unit
39.	Mini Komputer	1 Unit
40.	Local Area Network (LAN)	1 Unit
41.	Komputer PC	38 Unit
42.	Laptop	50 Unit
43.	Note Book	24 Unit
44.	CPU	2 Unit
45.	Hard Disk	3 Unit
46.	Printer	75 Unit
47.	Monitor	12 Unit
48.	Scanner	3 Unit
49.	Server	4 Unit
50.	Router	2 Unit
51.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit

No	Uraian	Jumlah
52.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit
53.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3 Unit
54.	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	2 unit
55.	Meja Tamu Ruangan Biasa	6 Unit
56.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit
57.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9 Unit
58.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit
59.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	38 Unit
60.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain2	1 Set
61.	Kamera	2 Unit
62.	Proyektor	1 Unit
63.	Unit Transceiver SSB Portable	1 Unit
64.	Sound System	1 Unit
65.	Compact Disc Player	2 Unit
66.	Microphone/Wireless Mic	1 Unit
67.	UPS	15 Unit
68.	Peralatan Studio Visual	16 Unit
69.	Camera Electronic	2 Unit
70.	Telephone (PABX)	1 Unit
71.	Intercom	8 Unit
72.	Facsimile	1 Unit
73.	Handphone	2 Unit
74.	Gedung BPKAD	2 Unit

2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban dan melaksanakan pelayanan kepada SKPD dan masyarakat secara tidak langsung berupa pelayanan pengelolaan keuangan dan pelayanan pengelolaan aset daerah. Kegiatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD. Dalam rangka memberi arahan dan penyampaian regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembinaan kepada SKPD berupa sosialisasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman

penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan aset daerah, serta pembinaan pengelolaan aset/barang milik daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dan sasaran BPKAD tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten serta sarana prasarana pendukung kinerja yang baik. Pencapaian target kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang mestinya diukur berdasarkan sasaran/target Renstra BPKAD periode sebelumnya. Tetapi hal ini tidak dilakukan karena adanya Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Baru di Kabupaten Pematang pada tanggal 3 Januari 2017 sehingga dilakukan revisi terhadap renstra Perangkat Daerah agar sesuai dengan Tujuan, Sasaran dan Target Perangkat Daerah baru yang terbentuk. Fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang pada tahun 2011-2015 dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Sehubungan dengan hal tersebut, pencapaian kinerja pelayanan BPKAD berdasarkan data lima tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan indikator kinerja BPKAD saat ini serta anggaran dan realisasi program dan kegiatan pendukung pelayanan tahun 2011-2015 sebagaimana Tabel 2.6 dan **Tabel 2.7** berikut :

Tabel : 2.6

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi capaian tahun					Rasio capaian pada tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
	Urusan Penunjang Bidang Keuangan																		
1	Ketepatan Waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Penatausahaan Aset yang memadai	-	-	-	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

4	Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Ketepatan waktu Penyampaian LKD ke BPK	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Hasil Opini BPK terhadap LKD	-	-	-	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Tabel : 2.7

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2015**

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Wajib																	
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.006.577.750	2.862.510.100	4.633.350.200	4.876.246.500	4.879.887.000	2.382.560.769	2.288.010.536	4.070.133.994	4.137.436.562	4.022.566.215	79,24	79,93	87,84	84,85	82,43	4.051.714.310	3.380.141.615
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.500.000	23.345.000	43.250.000	20.600.000	31.500.000	44.861.500	21.015.000	32.480.000	20.040.000	27.257.500	94,45	90,02	75,10	97,28	86,53	33.239.000	29.130.800
Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000	167.640.000	187.240.000	318.900.000	367.000.000	89.532.995	108.100.218	169.140.235	293.514.829	334.441.642	85,27	64,48	90,33	92,04	91,13	229.156.000	198.945.984
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	390.000.000	350.000.000	362.000.000	339.500.000	382.300.000	342.892.390	347.249.500	331.026.280	330.657.000	370.016.618	87,92	99,21	91,44	97,40	96,79	364.760.000	344.368.358
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	27.500.000	17.500.000	15.000.000	18.000.000	15.500.000	21.573.500	12.130.550	12.977.425	14.072.125	9.675.625	78,45	69,32	86,52	78,18	62,42	18.700.000	14.085.845
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	130.000.000	139.771.000	125.950.000	92.500.000	99.627.000	129.599.000	115.741.000	102.245.500	88.905.000	94.757.100	99,69	82,81	81,18	96,11	95,11	117.569.600	106.249.520
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	45.000.000	50.000.000	54.600.000	40.000.000	56.000.000	43.184.800	49.170.000	48.156.650	35.743.800	55.981.150	95,97	98,34	88,20	89,36	99,97	49.120.000	46.447.280
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	36.740.250	20.000.000	42.000.000	30.000.000	15.000.000	35.993.750	14.569.000	34.759.000	22.144.000	14.974.400	97,97	72,85	82,76	73,81	99,83	28.748.050	24.488.030
Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000	86.704.000	89.810.000	94.500.000	85.800.000	74.615.000	75.858.000	85.467.500	93.860.000	85.369.500	99,49	87,49	95,16	99,32	99,50	86.362.800	83.034.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	58.125.000	76.500.000	70.000.000	46.500.000	55.272.500	54.880.000	70.325.000	63.069.600	45.995.500	92,12	94,42	91,93	90,10	98,92	62.225.000	57.908.520

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	24.000.000	73.000.000	60.900.000	25.000.000	10.000.000	20.391.500	60.356.100	59.936.700	21.463.900	9.075.200	84,96	82,68	98,42	85,86	90,75	38.580.000	34.244.680
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	-	529.200.000	75.000.000	8.500.000	14.228.000	-	518.833.500	66.592.500	8.497.500	94,85	-	98,04	88,79	99,97	125.540.000	121.630.300
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	34.493.600	-	-	-	4.771.500	28.972.600	-	-	-	95,43	83,99	-	-	-	7.898.720	6.748.820
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	28.925.000	25.724.400	25.000.000	33.000.000	26.038.000	21.689.600	19.873.000	21.743.400	31.220.200	86,79	74,99	77,25	86,97	94,61	28.529.880	24.112.840
Penyediaan Makanan dan Minuman	140.000.000	135.000.000	127.000.000	141.500.000	153.500.000	135.436.300	122.436.850	118.678.800	139.928.598	147.244.015	96,74	90,69	93,45	98,89	95,92	139.400.000	132.744.913
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.000.000	139.620.000	175.000.000	97.100.000	175.000.000	92.351.866	119.917.150	125.427.300	92.577.540	163.066.393	92,35	85,89	71,67	95,34	93,18	137.344.000	118.668.050
Penyediaan Jasa Keamanan	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	19.200.000	-	-	-	100,00	96,00	8.000.000	7.840.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran Kas	41.762.500	-	38.775.500	65.865.000	67.500.000	31.010.000	-	29.160.500	60.729.087	50.682.888	74,25	-	75,20	92,20	75,09	42.780.600	34.316.495
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Belanja Tak Langsung PPKD	103.150.000	111.699.300	106.350.000	136.350.000	122.875.000	93.659.000	97.750.500	82.538.100	124.334.230	102.545.444	90,80	87,51	77,61	91,19	83,46	116.084.860	100.165.455
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan	190.840.000	194.293.000	194.523.800	219.000.000	207.285.000	172.189.500	163.560.000	161.103.150	194.124.800	197.618.400	90,23	84,18	82,82	88,64	95,34	201.188.360	177.719.170
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	70.085.000	-	70.472.500	70.472.500	90.000.000	59.685.000	-	67.432.500	68.329.000	73.909.450	85,16	-	95,69	96,96	82,12	60.206.000	53.871.190

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengelolaan Dana dan Anggaran Kas																	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Pendapatan	1.370.000.000	1.232.394.200	2.309.054.000	2.919.959.000	2.855.000.000	895.274.668	874.614.468	2.000.572.854	2.323.886.153	2.143.682.690	65,35	70,97	86,64	79,59	75,09	2.137.281.440	1.647.606.167
Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	-	-	-	57.000.000	38.000.000	-	-	-	41.721.000	37.355.000	-	-	-	73,19	98,30	19.000.000	15.815.200
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.951.725.000	3.465.455.000	2.832.091.100	3.565.530.000	3.513.171.000	1.796.394.630	3.248.700.257	2.450.086.188	3.177.318.485	3.358.503.721	92,04	93,75	86,51	89,11	95,60	3.065.594.420	2.806.200.656
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	990.000.000	1.570.000.000	1.376.500.000	2.622.630.000	2.063.630.000	890.436.100	1.552.193.750	1.179.899.100	2.298.936.350	2.018.897.800	89,94	98,87	85,72	87,66	97,83	1.724.552.000	1.588.072.620
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	35.000.000	43.000.000	35.803.600	92.000.000	110.400.000	33.069.000	-	35.040.500	83.420.000	110.400.000	94,48	-	97,87	90,67	100,00	63.240.720	52.385.900
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				48.000.000	132.620.000		-	-	47.710.000	132.370.000	-	-	-	99,40	99,81	90.310.000	45.020.000
Pengadaan Mebeleur	130.000.000	131.500.000	67.200.000	-	85.000.000	124.492.250	120.871.875	62.586.000	-	70.784.000	95,76	91,92	93,13	-	83,28	82.740.000	75.746.825
Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya	110.000.000	1.014.745.000	619.787.500	123.000.000	520.500.000	108.808.500	942.850.300	556.719.000	118.775.000	467.381.629	98,92	92,91	89,82	96,57	89,79	477.606.500	438.906.886
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	122.500.000	215.000.000	104.000.000	120.000.000	50.000.000	121.014.500	206.876.000	102.457.000	117.994.500	49.879.500	98,79	-	98,52	98,33	99,76	122.300.000	119.644.300
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	47.500.000	55.000.000	69.000.000	73.000.000	55.000.000	41.400.700	50.828.645	59.289.788	52.839.685	40.401.692	87,16	92,42	85,93	72,38	73,46	59.900.000	48.952.102
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	76.325.000	90.000.000	86.400.000	113.900.000	115.000.000	75.052.800	79.653.587	82.993.250	103.525.350	107.398.500	98,33	88,50	96,06	90,89	93,39	96.325.000	89.724.697

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	20.000.000	17.000.000	20.000.000	10.000.000	-	10.295.000	9.370.000	17.965.000	10.000.000	-	51,48	55,12	89,83	100,00	13.400.000	9.526.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	30.000.000	38.425.000	17.500.000	20.000.000	12.000.000	27.733.400	33.216.500	9.362.000	17.350.000	11.964.000	92,44	86,45	53,50	86,75	99,70	23.585.000	19.925.180
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	5.000.000	4.000.000	3.000.000	5.000.000	10.000.000	4.831.000	3.928.000	2.994.500	5.000.000	9.718.000	96,62	98,20	99,82	100,00	97,18	5.400.000	5.294.300
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer dan Perlengkapannya	-	-	-	61.000.000	69.021.000	-	-	-	60.630.000	69.006.000	-	-	-	99,39	99,98	26.004.200	25.927.200
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pengelolaan Aset Daerah	155.000.000	165.000.000	231.400.000	152.000.000	150.000.000	131.940.000	161.955.000	225.640.000	151.135.000	147.706.600	85,12	98,15	97,51	99,43	98,47	170.680.000	163.675.320
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Software dan Sitem Informasi	250.400.000	118.785.000	204.500.000	115.000.000	130.000.000	237.616.380	86.031.600	123.735.050	102.037.600	112.596.000	94,89	72,43	60,51	88,73	86,61	163.737.000	132.403.326
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	350.000.000	471.525.000	366.850.000	210.000.000	37.913.000	236.674.075	436.592.876	207.043.200	122.226.485	19.944.752	67,62	92,59	56,44	58,20	52,61	287.257.600	204.496.278
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	350.000.000	471.525.000	366.850.000	210.000.000	37.913.000	236.674.075	436.592.876	207.043.200	122.226.485	19.944.752	67,62	92,59	56,44	58,20	52,61	287.257.600	204.496.278
Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	379.835.000	310.920.000	307.850.000	322.500.000	409.500.000	350.305.050	272.561.500	275.363.457	291.380.300	375.572.654	92,23	87,66	89,45	90,35	91,71	346.121.000	313.036.592
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Tapkin)	20.000.000	22.050.000	21.800.000	16.000.000	17.000.000	19.369.550	20.380.750	17.610.500	15.703.200	16.991.100	96,85	92,43	80,78	98,15	99,95	19.370.000	18.011.020
Penyusunan Pelaporan Keuangan	25.000.000	25.000.000	13.550.000	15.000.000	14.500.000	24.381.250	23.130.000	13.423.900	14.112.500	13.696.000	97,53	92,52	99,07	94,08	94,46	18.610.000	17.748.730

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Semesteran																	
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	20.000.000	23.420.000	23.000.000	20.000.000	33.000.000	18.173.400	22.995.000	18.637.500	19.961.000	32.950.700	90,87	98,19	81,03	99,81	99,85	23.884.000	22.543.520
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasian	66.325.000	80.950.000	80.000.000	87.500.000	85.000.000	64.217.500	62.718.100	68.838.357	76.000.900	76.943.842	96,82	77,48	86,05	86,86	90,52	79.955.000	69.743.740
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasian	142.010.000	59.500.000	81.500.000	87.500.000	165.000.000	122.935.350	54.398.550	77.268.200	83.452.700	146.169.312	86,57	91,43	94,81	95,37	88,59	107.102.000	96.844.822
Penyusunan Rekonsiliasi Data Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD	106.500.000	100.000.000	88.000.000	96.500.000	95.000.000	101.228.000	88.939.100	79.585.000	82.150.000	88.821.700	95,05	88,94	90,44	85,13	93,50	97.200.000	88.144.760
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	50.000.000	36.270.000	34.600.000	37.000.000	52.000.000	49.392.500	35.285.700	26.528.000	36.979.350	51.159.000	98,79	97,29	76,67	99,94	98,38	41.974.000	39.868.910
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	50.000.000	36.270.000	34.600.000	37.000.000	52.000.000	49.392.500	35.285.700	26.528.000	36.979.350	51.159.000	98,79	97,29	76,67	99,94	98,38	41.974.000	39.868.910
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.875.238.000	2.744.229.800	3.359.225.014	4.173.273.500	3.736.400.000	3.226.001.729	2.380.904.334	2.796.383.736	3.340.937.168	3.171.745.338	83,25	86,76	83,24	80,06	84,89	3.577.673.263	2.983.194.461
Penyusunan Analisis Standar Belanja	150.000.000	110.000.000	134.800.000	125.500.000	125.000.000	132.431.400	101.444.925	114.738.550	97.344.650	109.700.700	88,29	92,22	85,12	77,57	87,76	129.060.000	111.132.045
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah	-	-	-	36.500.000	50.000.000	-	-	-	35.019.625	23.119.400	-	-	-	95,94	46,24	17.300.000	11.627.805

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	87.000.000	75.000.000	81.000.000	75.600.000	75.000.000	86.761.875	74.405.100	79.620.250	75.105.400	74.758.700	99,73	99,21	98,30	99,35	99,68	78.720.000	78.130.265
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi	222.000.000	-	-	-	-	101.248.000	-	-	-	-	45,61	-	-	-	-	44.400.000	20.249.600
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	250.000.000	210.943.000	220.943.000	275.500.000	240.000.000	225.735.925	198.249.985	211.493.362	255.704.835	235.508.282	90,29	93,98	95,72	92,81	98,13	239.477.200	225.338.478
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	50.000.000	45.000.000	55.000.000	46.500.000	45.000.000	38.067.950	39.265.400	47.700.500	41.637.000	41.826.800	76,14	87,26	86,73	89,54	92,95	48.300.000	41.699.530
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD	250.000.000	240.940.000	255.000.000	300.000.000	280.000.000	239.248.400	226.273.600	222.446.050	285.395.815	273.621.450	95,70	93,91	87,23	95,13	97,72	265.188.000	249.397.063
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD	50.000.000	45.000.000	50.940.000	46.500.000	45.000.000	43.887.470	39.649.175	46.269.300	40.658.460	44.305.600	87,77	88,11	90,83	87,44	98,46	47.488.000	42.954.001
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	266.075.000	243.000.000	246.500.000	250.000.000	235.000.000	249.094.325	218.449.300	241.694.200	232.090.156	228.351.189	93,62	89,90	98,05	92,84	97,17	248.115.000	233.935.834
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	102.565.000	34.000.000	34.000.000	34.000.000	25.000.000	90.514.250	25.134.700	27.303.250	27.748.350	23.756.932	88,25	73,93	80,30	81,61	95,03	45.913.000	38.891.496

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	450.000.000	-	-	-	-	447.937.000	-	-	-	-	99,54	-	-	-	-	90.000.000	89.587.400
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	352.000.000	130.000.000	245.000.000	328.000.000	313.100.000	312.501.045	116.052.300	226.986.800	269.147.150	278.913.360	88,78	89,27	92,65	82,06	89,08	273.620.000	240.720.131
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	-	400.000.000	423.801.000	364.341.000	503.000.000	-	385.775.405	354.673.070	327.522.650	409.307.210	-	96,44	83,69	89,89	81,37	338.228.400	295.455.667
Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	347.575.000	253.361.800	272.402.514	319.500.000	296.000.000	338.828.000	252.425.300	262.672.900	312.898.350	287.928.900	97,48	99,63	96,43	97,93	97,27	297.767.863	290.950.690
Peningkatan Manajemen Pembayaran PBB Aset/ Barang Daerah	38.000.000	38.000.000	43.000.000	36.000.000	28.000.000	28.561.689	34.319.784	24.831.500	29.231.754	19.664.124	75,16	90,32	57,75	81,20	70,23	36.600.000	27.321.770
Peningkatan Manajemen Sarana dan Prasarana Aset/ Barang Daerah	90.050.000	-	17.100.000	16.000.000	22.000.000	85.015.425	-	3.127.000	13.890.000	15.549.500	94,41	-	18,29	86,81	70,68	29.030.000	23.516.385
Peningkatan Manajemen Tertib Administrasi Pengelolaan Aset/ Barang Daerah	310.000.000	160.000.000	164.400.000	169.500.000	145.000.000	223.843.750	78.981.825	66.721.600	123.128.350	74.864.832	72,21	49,36	40,58	72,64	51,63	189.780.000	113.508.071
Peningkatan Manajemen Pelaporan Semesteran Aset/ Barang Daerah	250.000.000	150.000.000	403.876.000	858.000.000	572.500.000	156.766.500	84.792.875	345.107.800	534.197.283	465.672.908	62,71	56,53	85,45	62,26	81,34	446.875.200	317.307.473
Peningkatan Manajemen Penghapusan dan Pemantauan Aset/ Barang Daerah	110.000.000	70.000.000	93.600.000	175.000.000	145.800.000	54.947.075	63.731.450	64.458.250	99.276.750	96.531.500	49,95	91,04	68,87	56,73	66,21	118.880.000	75.789.005

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito	93.798.000	98.385.000	100.862.500	97.832.500	96.000.000	84.705.500	80.165.500	64.367.000	95.738.000	85.820.450	90,31	81,48	63,82	97,86	89,40	97.375.600	82.159.290
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Pengelolaan Dana Perimbangan	60.000.000	60.000.000	50.000.000	50.000.000	25.000.000	53.532.000	18.539.910	29.274.554	12.212.000	8.586.651	89,22	30,90	58,55	24,42	34,35	49.000.000	24.429.023
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Tanah Dana Pendidikan	-	145.600.000	195.000.000	242.000.000	230.000.000	-	136.752.800	177.614.500	191.349.650	191.725.250	-	93,92	91,08	79,07	83,36	162.520.000	139.488.440
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	346.175.000	-	-	-	-	232.374.150	-	-	-	-	67,13	-	-	-	-	69.235.000	46.474.830
Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	-	-	-	17.500.000	25.000.000	-	-	-	17.103.000	15.500.000	-	-	-	97,73	62,00	8.500.000	6.520.600
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Pengelolaan Eks Bando Desa yang daerahnya berubah menjadi Kelurahan	-	135.000.000	212.000.000	198.000.000	110.000.000	-	116.371.500	151.142.000	133.225.900	89.750.000	-	86,20	71,29	67,29	81,59	131.000.000	98.097.880
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	-	50.000.000	60.000.000	111.500.000	105.000.000	-	41.493.500	34.141.300	91.312.040	76.981.600	-	82,99	56,90	81,89	73,32	65.300.000	48.785.688
Peningkatan efektivitas pengelola keuangan	-	50.000.000	-	-	-	-	48.630.000	-	-	-	-	97,26	-	-	-	10.000.000	9.726.000

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
daerah																	
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	256.248.000	326.750.000	351.500.000	383.500.000	372.000.000	255.484.350	316.466.200	340.228.950	366.498.700	363.634.308	99,70	96,85	96,79	95,57	97,75	337.999.600	328.462.502
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	146.248.000	168.000.000	179.000.000	191.500.000	192.000.000	146.038.000	166.333.600	174.376.300	186.163.250	190.982.364	99,86	99,01	97,42	97,21	99,47	175.349.600	172.778.703
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Desa/ Kelurahan	110.000.000	87.000.000	87.000.000	87.000.000	80.000.000	109.446.350	85.058.100	86.157.100	85.354.450	79.318.644	99,50	97,77	99,03	98,11	99,15	90.200.000	89.066.929
Klarifikasi Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa	-	71.750.000	85.500.000	105.000.000	100.000.000	-	65.074.500	79.695.550	94.981.000	93.333.300	-	90,70	93,21	90,46	93,33	72.450.000	66.616.870
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	175.060.000	23.541.900	146.293.686	179.500.000	132.715.000	166.539.450	8.726.900	137.097.950	156.869.050	121.332.100	95,13	37,07	93,71	87,39	91,42	131.422.117	118.113.090
Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	145.000.000	-	120.042.000	136.500.000	100.000.000	144.714.450	-	117.925.700	134.307.550	97.699.600	99,80	-	98,24	98,39	97,70	100.308.400	98.929.460
Tindak Lanjut Temuan Pengawasan	30.060.000	23.541.900	26.251.686	43.000.000	32.715.000	21.825.000	8.726.900	19.172.250	22.561.500	23.632.500	72,60	37,07	73,03	52,47	72,24	31.113.717	19.183.630
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	135.000.000	90.000.000	70.000.000	70.000.000	125.000.000	38.491.100	46.147.884	41.842.150	44.736.769	20.896.088	28,51	51,28	59,77	63,91	16,72	98.000.000	38.422.798
Fasilitasi/ Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar	135.000.000	90.000.000	70.000.000	70.000.000	125.000.000	38.491.100	46.147.884	41.842.150	44.736.769	20.896.088	28,51	51,28	59,77	63,91	16,72	98.000.000	38.422.798

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
daerah pada Bidang Ekonomi																	
Jumlah keseluruhan -->	10.179.683.750	10.331.201.800	12.101.760.000	13.817.550.000	13.258.586.000	8.501.843.653	9.033.396.187	10.344.707.625	11.674.382.869	11.505.354.176	83,52	87,44	85,48	84,49	86,78	11.937.756.310	10.211.936.902

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity, Treath).

A. Faktor Internal :

a. *Kekuatan/Potensi (Strength)*

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPKAD;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD;
4. Kemampuan SDM yaitu kemampuan dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. *Kelemahan (Weaknes)*

1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan pelaksana yang berlatar belakang akuntansi dan tekhnologi aplikasi komputer.
3. Belum adanya pejabat fungsional penyusun laporan keuangan, pejabat fungsional pengadaan barang, Appraisal, pejabat fungsional humas dan IT yang mendukung akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan fungsi BPKAD.

B. Faktor Eksternal :

a. *Kesempatan/Peluang (Opportunity)*

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi BPKAD termasuk kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2. Hubungan kerja yang baik antara BPKAD dengan instansi terkait/stakeholder;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan dari seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset daerah;
4. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun Legislatif.

b. Tantangan/Ancaman (*Treath*)

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
2. Tuntutan peningkatan keakuratan data dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Laporan Barang Daerah dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk mendukung salah satu misi Kabupaten Pemalang yaitu : ” Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah ”
3. Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta perkembangan teknologi informatika yang sangat pesat menuntut pelayanan informasi yang cepat, tepat, akurat dan praktis.
4. Kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada masing-masing Perangkat Daerah yang kurang memadai dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada masing-masing Perangkat Daerah. Hal ini akan berdampak pada penyusunan laporan keuangan dan aset daerah konsolidasi yang menjadi tanggungjawab BPKAD selaku SKPKD;

Tabel : 2.8
 Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPKAD Pemalang
 Terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Sasaran Renstra BPKAD Pemalang	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD
2	Ketepatan waktu penerbitan SP2D			
3	Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD			
4	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan ke BPK			
5	Persentase Pemanfaatan Aset			

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya, antara lain :

1. Dengan terbitnya undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, hal ini

merupakan tantangan besar bagi BPKAD Kabupaten Pematang Jaya. Keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada publik membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi serta kemampuan mengolah data dan informasi menjadi konsumsi publik yang menarik dan informatif sehingga dapat dikonsumsi oleh publik tanpa menimbulkan multitafsir;

2. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
3. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset daerah pada masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Perangkat Daerah sehingga menyebabkan banyaknya kesalahan/kekeliruan dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan aset daerah. SDM sangat memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program - program pembangunan sehingga kompetensi SDM merupakan titik fokus yang harus diperhatikan dalam penempatan SDM pada BPKAD Kabupaten Pematang Jaya;

4. Optimalisasi belanja merupakan faktor pendukung efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Pengalokasian belanja yang mendukung program prioritas pada RPJMD merupakan salah satu kebijakan local Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Hal ini menjadi kendala ketika kapasitas anggaran tidak mencukupi kebutuhan pemenuhan program prioritas. Sehingga pelaksanaan kegiatan yang masuk program prioritas dilakukan secara bertahap.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kegiatan ini ada di BPKAD selaku SKPKD yang mengelola aset Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Inventarisasi aset dan pengelolaan aset pada perangkat daerah harus selalu dilakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi karena sebagian besar pengelola aset perangkat daerah belum familiar dengan aplikasi SIMDA BMD dalam melakukan inventarisasi aset daerah. Inventarisasi aset yang benar dan sesuai ketentuan sangat menentukan akurasi penatausahaan aset dimana jumlah aset yang dicatat pada KIB sama dengan bukti fisik aset yang ada sebenarnya. Sehingga pelaporan aset pada neraca menggambarkan kondisi riil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel : 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Pemalang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan BPKAD
			Internal (Kewenangan BPKAD)	Eksternal (diluar Kewenangan BPKAD)	
Penggunaan elektronik planning dan elektronik budgeting dalam pengelolaan keuangan daerah	Telah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan secara online dalam pengelolaan keuangan dan telah menggunakan SIMCAN (SIM Perencanaan) secara online tetapi belum terintegrasi.	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel mulai dari proses penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban	BPKAD harus berkoordinasi dengan BPKP terkait output yang akan dipublikasikan karena tidak semua data yang dientry layak publikasi.	Perencanaan secara elektronik berada di perangkat daerah yang membidangi perencanaan. Sedangkan Integrasi elektronik budgeting dan elektronik planning menjadi e-Government berada dalam kewenangan Diskominfo.	Apabila e-planning dan e-budgeting tidak diintegrasikan maka sinkronisasi pagu anggaran kegiatan pada KUA PPAS dengan RKA/DPA dilakukan secara manual. Hal ini membutuhkan ketelitian yang tinggi dan waktu yang lama. Selain itu, keterbukaan informasi kepada publik belum dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Kabupaten Pemalang belum melaksanakan e-Gov.

<p>Kewajiban menggunakan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB) guna efisisensi anggaran.</p>	<p>Bupati telah menetapkan Perbup tentang SSH yang menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA/DPA dan perubahannya.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Pematang melalui bagian Administrasi Pembangunan sedang berupaya menyusun ASB dan memasukkannya maenjadi peraturan bupati agar dapat menjadi pedoman bagi perangkat daerah.</p>	<p>Usulan dan penyusunan RKA/DPA perangkat daerah serta perubahannya mempedomani prinsip efisiensi dan efektifitas dimana segala belanja yang timbul harus mengacu pada SSH dan ASB</p>	<p>BPKAD selalu mengupdate data yang tercantum dalam SSH agar sinkron dengan kondisi riil di lapangan.</p>	<p>ASB masih dalam proses penyusunan sehingga baru dapat dijadikan pedoman pada saat penyusunan RKAP/DPPA tahun anggaran 2019.</p>	<p>Ketimpangan belanja karena menggunakan pagu dan standar yang berbeda-beda mengakibatkan tidak tercapainya efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Pematang.</p>
<p>Capaian Realisasi Program Kegiatan yang sesuai dengan perencanaan</p>	<p>Prosentase penyerapan anggaran secara total dalam program</p>	<p>Penyerapan anggaran mencapai prosentase tinggi yang seiring dengan</p>	<p>Kebijakan penggeseran dan perubahan Anggaran</p>	<p>Perencanaan dan Pelaksana Teknis di perangkat daerah hanya</p>	<p>Optimalisasi belanja pemerintah daerah sebagai stimulus fiskal</p>

	dan kegiatan telah tinggi tetapi tidak mencerminkan penyerapan pada masing-masing kegiatan	pencapaian output/target kinerja yang optimal.		mengantisipasi pencapaian realisasi anggaran yang maksimal tetapi belum mempertimbangkan capaian output kinerja yang optimal.	
Pengelolaan aset yang optimal sebagai unsur lain-lain PAD yang sah	Pengelolaan aset yang dilaksanakan belum optimal	Meningkatnya Lain-Lain PAD dari pengelolaan aset	Penentuan tarif sewa aset	Batas sewa aset tergantung pada kebijakan pemanfaatan aset di Perangkat Daerah lain	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah
Penetapan Peraturan yang mengatur tata kelola keuangan daerah	Menyusun pedoman dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Telah ditetapkan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah	Menyusun peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah	Terdapat kebijakan dari pemerintah pusat dan propinsi tentang pengelolaan keuangan lainnya.	Komitmen yang kuat dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan Dana Perimbangan sesuai ketentuan	Pengelolaan Dana Perimbangan belum optimal	Optimalnya pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari dana perimbangan	Sosialisasi kepada OPD tentang kebijakan pengelolaan dana perimbangan	Kepatuhan dan ketepatan OPD dalam pelaksanaan program kegiatan yang bersumber	Koordinasi yang intensif guna optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

				dari dana perimbangan	
Pelaporan nilai aset dalam neraca yang akuntabel	Nilai aset belum disajikan secara akuntabel	Nilai aset yang akuntabel	Pembinaan kepada pengurus barang dalam hal pengelolaan aset	Kompetensi pengurus barang pada OPD terkait penunjukkan/pemilihan SDM sebagai pengurus barang	Akurasi penatusahaan aset sebagai salah satu bahan penyusunan neraca guna peningkatan kualitas laporan keuangan daerah
Pelaporan Keuangan berbasis akrual dan berbasis Teknologi Informasi	Keterbatasan SDM berlatar belakang ilmu akuntansi dan menguasai Teknologi Informasi sebagai penyusun pelaporan Keuangan	Jumlah SDM yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan teknologi informasi	Penempatan SDM yang berkompeten di bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi di bidang Akuntansi dan Pelaporan	Penerimaan SDM yang berkompeten dalam bidang akuntansi dan Teknologi Informasi	Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi dan akuntansi
Pengelolaan Aset Daerah berbasis Teknologi Informasi	Pengurus barang pada OPD belum sepenuhnya menggunakan aplikasi SIMDA BMD	Ketrampilan dan pemahaman pengurus barang dalam penggunaan SIMDA BMD	Sosialisasi SIMDA BMD yang selalu update kepada pengurus barang OPD	Kompetensi pengurus barang	Kurangnya pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIMDA BMD

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib, lancar dan menyajikan data yang akuntabel dan update. Pengelolaan keuangan berbasis IT yang dapat diakses dimana pun merupakan target BPKAD selaku SKPKD yang masuk dalam renstra BPKAD 2016-2021.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pematang terpilih periode 2016-2021 adalah **“Terwujudnya**

Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BPKAD Kabupaten Pemalang, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-6 yaitu : “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah”.

Peran serta BPKAD dalam misi dimaksud adalah mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN, berwibawa dan ikhlas dalam melayani masyarakat, serta meningkatnya kapasitas Aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas BPKAD Kabupaten Pematang Jaya terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tersebut diatas adalah “membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta melaksanakan tugas Pembantuan” sedangkan fungsi BPKAD Kabupaten Pematang Jaya adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pematang Jaya, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan.

Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Pematang Jaya serta mensinergikan arah kebijakan. Selanjutnya sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel : 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Pematang Jaya Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi : 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah			
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh pengelola keuangan OPD	Penerapan Teknologi Informasi yang terintegrasi dalam pelaporan keuangan
		Optimalisasi belanja pemerintah daerah sebagai stimulus fiskal	Perencanaan OPD kurang optimal	Monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan OPD
		Komitmen yg kuat dlm kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Kurangnya pemahaman penyusun laporan OPD dalam pengelolaan keuangan daerah	Penetapan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah

		Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;	Kurangnya pemahaman pengguna barang di perangkat daerah tentang pemanfaatan aset daerah	Pemantauan Pemanfaatan aset daerah
		Koordinasi yg intensif guna optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;	Laporan realisasi pengelolaan dana perimbangan di OPD belum tepat waktu	Sinergitas kebijakan pengelolaan dana perimbangan antara Kementerian Keuangan dan Pemda
		Akurasi penatausahaan aset sebagai salah satu bahan penyusunan neraca guna peningkatan kualitas laporan keuangan daerah	Kompetensi pengurus barang yang kurang memadai dalam hal pengelolaan aset daerah berbasis teknologi informasi	Penggunaan aplikasi SIMDA BMD dalam penatausahaan aset daerah
		Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dibidang teknologi informasi dan akuntansi	Kompetensi penyusun laporan keuangan OPD belum sesuai kebutuhan	Bintek dan Sosialisasi Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi bagi pengelola keuangan OPD
		Kurangnya pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIMDA BMD	Interpretasi terhadap jabatan pengurus barang pada OPD belum sepenuhnya dipahami oleh Pengguna Barang OPD sehingga penunjukkan pengurus barang kompetensinya belum sesuai kebutuhan/ kurang berkompeten	Sosialisasi penatausahaan aset dengan SIMDA BMD terhadap pengurus barang OPD

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Pada tingkat kementerian lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah adalah Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD), Visi dari DJKD adalah : **“Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”**, dengan misinya adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan :

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif

Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitas pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitas pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis investasi daerah yang meliputi investasi dan kekayaan daerah, BUMN dan BLUD, dana bergulir, dan penyertaan modal daerah serta pinjaman dan obligasi daerah;
3. Menyiapkan rumusan kebijakan dan standarisasi teknis serta fasilitas, monitoring dan evaluasi DAU, DBH, DAK, dana transfer lainnya serta sinkronisasi kebijakan dan dukungan teknis;
4. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitas di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah, bantuan keterangan ahli, pemberian dukungan teknis, informasi keuangan daerah serta pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah;
5. Melaksanakan koordinasi penyusunan perancangan program, penyiapan data dan informasi, keuangan, kepegawaian, dan urusan rumah tangga serta penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan.

Strategi :

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Pada tingkat Provinsi Jawa Tengah kementerian lembaga yang terkait erat dengan pengelolaan pendapatan, keuangan aset daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPPAD), Visi dari DPPAD Tahun 2013-2018 adalah : “Menjadi Dinas yang Transparan dan Akuntabel didukung oleh Pelayanan Prima dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna”, dengan misinya adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM;
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi;
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur;
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah;
7. Menintensifkan dan mengekstensifkan pumungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain
8. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan asset daerah;
9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan asset daerah.

Tujuan :

1. Mewujudkan SDM yang memiliki kompetensi, professional dan produktif dalam melaksanakan pekerjaan;
2. Mewujudkan tata kelola administrasi yang cepat, mudah, efisien dan efektif;
3. Mewujudkan tata kerja sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan publik;
4. Mewujudkan pelayanan yang baik, aparatur yang disiplin, beretos kerja tinggi, inovatif dan berprestasi;
5. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggara pelayanan;
6. Mewujudkan tertib administrasi pengelolan aset daerah yang efektif dan efsien;
7. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan dan

pemberdayaan aset daerah guna memberikan kontribusi pada pendapatan daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas kerja aparatur.
2. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan.
3. Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat.
4. Meningkatnya kepuasan publik.
5. Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisien kerja.
6. Terwujudnya suasana kerja yang kondusif, meningkatnya produktivitas kerja.dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.
7. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana utama dan pendukung pelayanan sehingga terwujud peningkatan kepuasan pelayanan publik.
8. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah.
9. Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah.
10. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas kompetensi, professional dan produktifitas sumber daya manusia;
2. Pengembangan implementasi teknologi informasi;
3. Peningkatan tata kerja sesuai dengan sistem dan prosedur;
4. Peningkatan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;
6. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah;
7. Optimalisasi pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

Strategi :

1. Memberikan kesempatan studi lanjut, pendidikan penjenjangan, kursus, menyelenggarakan bimbingan teknis, rapat teknis, dan studi komparasi.
2. Meningkatkan kapasitas perangkat keras dan

- mengembangkan perangkat lunak sesuai kebutuhan.
3. Meningkatkan komitmen seluruh level manajemen dalam pelaksanaan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan SPP (Standar Pelayanan Publik).
 4. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan tugas secara konsisten dan memberikan *rewards and punishment*.
 5. Merehabilitasi dan atau membangun gedung baru, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai.
 6. Mengadministrasikan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku secara profesional berbasis teknologi.
 7. Memasarkan aset daerah yang lebih efektif dan efisien.

Tabel : 3.3
 Permasalahan Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang
 berdasarkan sasaran Renstra K/L beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan
 penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Kurangnya Penguasaan Teknologi Informasi oleh pengelola keuangan Perangkat Daerah	Penerapan Teknologi Informasi yang terintegrasi dalam pelaporan keuangan
		Optimalisasi belanja pemerintah daerah sebagai stimulus fiskal	Perencanaan Perangkat Daerah kurang optimal	Monitoring dan Evaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah
		Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah	Kurangnya pemahaman pengguna barang di perangkat daerah tentang pemanfaatan Aset Daerah	Pemantauan Pemanfaatan aset daerah

		Komitmen yang kuat dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Kurangnya pemahaman penyusun laporan keuangan Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah	Penetapan Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah
		Koordinasi yang intensif guna optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah	Laporan Realisasi pengelolaan dana perimbangan di Perangkat Daerah belum tepat waktu	Sinergitas kebijakan pengelolaan dana perimbangan antara Kementerian Keuangan dan Pemda
		Akurasi penatausahaan aset sebagai salah satu bahan penyusunan neraca guna peningkatan kualitas laporan keuangan daerah	Kompetensi pengurus barang yang kurang memadai dalam hal pengelolaan aset daerah berbasis teknologi informasi	Penggunaan aplikasi SIMDA BMD dalam penatausahaan aset daerah
		Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi	Kompetensi penyusun laporan keuangan OPD belum sesuai kebutuhan	Bintek dan Sosialisasi Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis teknologi

		dan akuntansi		informasi bagi pengelola keuangan OPD	
		Kurangnya pemahaman pengurus terhadap BMD	barang aplikasi	Interpretasi terhadap jabatan pengurus barang pada OPD belum sepenuhnya dipahami oleh pengguna barang OPD sehingga penunjukkan pengurus barang kompetensinya belum sesuai kebutuhan/kurang berkompeten	Sosialisasi penatausahaan aset dengan SIMDA BMD terhadap pengurus barang OPD

Tabel : 3.4
 Permasalahan Pelayanan BPKAD Kabupaten Pematang
 berdasarkan sasaran Renstra SKPD Provinsi
 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tersajinya informasi yang cepat, lengkap dan akurat	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Kurangnya Penguasaan Teknologi Informasi oleh pengelola keuangan Perangkat Daerah	Penerapan Teknologi Informasi yang terintegrasi dalam pelaporan keuangan Daerah
2.	Terwujudnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan	Optimalisasi belanja pemerintah daerah sebagai stimulus fiskal	Perencanaan Perangkat Daerah yang kurang optimal	Monitoring dan Evaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah
3.	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pemanfaatan aset	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah	Kurangnya pemahaman pengguna barang di perangkat daerah tentang pemanfaatan Aset Daerah	Pemantauan dan Pemanfaatan aset daerah

4.	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas kerja aparatur	Komitmen yang kuat dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah	Kurangnya pemahaman penyusun laporan keuangan perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah	Penetapan Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah
5.	Peningkatan pendapatan daerah dari unsur retribusi dan pendapatan lain-lain	Koordinasi yang intensif guna optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah	Laporan Realisasi pengelolaan dana perimbangan di Perangkat Daerah belum tepat waktu	Sinergitas kebijakan pengelolaan dana perimbangan antara Kementerian Keuangan dan Pemda
6.	Meningkatnya kejelasan atas administrasi dan status aset daerah	Akurasi penatausahaan aset sebagai salah satu bahan penyusunan neraca guna peningkatan kualitas laporan keuangan daerah	Kompetensi pengurus barang yang kurang memadai dalam hal pengelolaan aset daerah berbasis teknologi informasi	Penggunaan aplikasi SIMDA BMD dalam penatausahaan aset daerah
7.	Meningkatnya ketepatan, kecepatan dan efisiensi kerja	Terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi informasi	Kompetensi penyusun laporan keuangan Perangkat Daerah belum memadai.	Bintek, Sosialisasi dan pendampingan tentang kebijakan Akuntansi

		dan akuntansi		Pemerintah Daerah berbasis teknologi informasi bagi pengelola keuangan perangkat daerah
8.	Meningkatnya pemanfaatan aset daerah	Kurangnya pemahaman pengurus terhadap barang aplikasi BMD	Interpretasi terhadap jabatan pengurus barang pada perangkat daerah belum sepenuhnya dipahami oleh pengguna barang perangkat daerah sehingga penunjukkan pengurus barang kompetensinya tidak memadai atau belum sesuai kebutuhan.	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Inventarisasi aset dengan SIMDA BMD terhadap pengurus barang perangkat daerah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Telaahan RTRW Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 yang dimaksudkan adalah identifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang ditinjau dari implikasi RTRW. Salah satu tugas pokok BPKAD adalah pengelolaan aset daerah, dalam hal ini adalah pemanfaatan aset daerah secara optimal sebagai kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Mengingat pemanfaatan aset berkaitan dengan penggunaan/ peruntukan lahan/ tanah oleh pemohon/ pengguna, maka RTRW mempunyai pengaruh/ berimplikasi pada pengelolaan aset daerah.

Tabel : 3.5

Permasalahan Pelayanan BPKAD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	-	Pemanfaatan aset oleh pihak yang lain yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan	Kebutuhan pemakai/ pemohon	Peraturan/ regulasi tentang RTRW dan pengelolaan

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Hanya ada satu program yang menjadi tanggungjawab BPKAD Kabupaten Pemalang adalah Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan yang masuk dalam program tersebut tidak ada yang berdampak langsung pada lingkungan hidup atau memberikan dampak negative pada lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Isu strategis terkait erat dengan tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Pemalang. Adapun tujuan BPKAD sebagai perangkat daerah yang strategis dalam pengelolaan keuangan adalah Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan tujuan tersebut BPKAD Kabupaten Pemalang mempunyai sasaran kinerja yaitu :

” Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ”

Isu strategis yang muncul berdasarkan tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. Amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi mendorong BPKAD untuk meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diupayakan mendukung terwujudnya hasil opini dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

2. Penggunaan Teknologi Informasi yang terintegrasi dan mudah diakses dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah bertujuan agar penyusunan Laporan Keuangan, Penetapan Perda APBD, Penetapan Perda Perubahan APBD dan Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD terlaksana tepat waktu serta memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses data keuangan dan aset daerah yang valid melalui aplikasi atau pun web;
3. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset agar tercapai nilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pencapaian hasil opini pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian dengan cara :
 - a. Penatausahaan aset daerah yang akurat serta pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang optimal agar tersaji nilai aset pada Neraca dengan nilai akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tercapai peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah dari pemanfaatan aset daerah;
 - b. Peningkatan kompetensi pengurus barang dalam penatausahaan aset daerah yang didukung dengan ketrampilan mengoperasikan SIMDA BMD merupakan salah satu upaya pengamanan aset daerah.

Tabel : 3.6
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-Lain
1.	Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat pesat	Penetapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi oleh	Amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi mendorong untuk BPKAD	Tuntutan keterbukaan informasi yang semakin

	serta keterbukaan informasi melalui media elektronik	Pemerintah dan ketentuan untuk mempublikasikan APBD dan Pertanggungjawaban APBD melalui media agar masyarakat dapat mengetahuinya	meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diupayakan mendukung terwujudnya hasil opini dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	meningkat dari masyarakat
			Penggunaan Teknologi Informasi yang terintegrasi dan mudah di akses dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah bertujuan agar penyusunan Laporan Keuangan, Penetapan Perda APBD, Penetapan Perda Perubahan APBD dan Penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD terlaksana tepat waktu serta memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses data	

			keuangan dan aset daerah yang valid melalui aplikasi atau pun web	
			Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset agar tercapai nilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pencapaian hasil opini pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

4.1.1 Tujuan

Tujuan BPKAD Kabupaten Pemalang guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai, tujuan ditetapkan berdasarkan potensi, isu-isu strategis dan permasalahan yang ada pada pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah **“Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”**.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh BPKAD Kabupaten Pemalang dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran merupakan hasil yang dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun jangka waktu Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah :

“Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah “

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator capaian dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah.

Tabel : 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1	Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Tingkat Aduan dan Kepuasan Pengguna Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ke BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Ketepatan waktu penerbitan SP2D	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pemanfaatan Aset Daerah	90%	90%	90%	90%	90%	90%

4.2. Strategi dan Kebijakan BPKAD

4.2.1. Strategi BPKAD

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan. Strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan adalah :

1. Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur di BPKAD untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kompetensi dengan mengikutsertakan diklat dan seminar serta penyelenggaraan sosialisasi dan Bimtek pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penggunaan hardware dan software yang compatible dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses data keuangan dan aset daerah yang valid serta terwujudnya akuntabilitas Pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis Teknologi Informasi yang memadai.
4. Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan dan pengurus barang pada perangkat daerah agar tersaji data keuangan dan aset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mewujudkan sinergitas dan relevansi data laporan keuangan dan aset daerah SKPD dengan laporan keuangan dan aset daerah konsolidasi.
6. Meningkatkan kinerja dan budaya kerja aparatur agar masyarakat dapat terlayani dengan baik;
7. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam melaksanakan program kegiatan.

8. Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan aset yang memadai.

4.2.2. Kebijakan BPKAD

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan. Dari gambaran telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah, maka dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta strategi, terlihat bahwa ada kesesuaian dengan tupoksi dari BPKAD terutama yang terkait dengan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Beberapa sasaran yang bisa diadopsi untuk diimplementasikan dalam Renstra BPKAD Kabupaten Pemalang, yaitu: “Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD”.

Adapun arah kebijakan yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas, kompetensi, profesionalisme dan produktivitas kerja aparatur pada BPKAD dengan cara pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimtek/Sosialisasi/Diklat/Workshop/Seminar tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan mencukupi kuantitas kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Penggunaan dan pengembangan Teknologi Informasi dalam upaya memberikan pelayanan yang prima atas pengelolaan keuangan dan aset daerah;

4. Memfasilitasi pelaksanaan Bimtek dan pendampingan terhadap pengelola keuangan dan pengurus barang perangkat daerah.
5. Melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dan aset daerah yang dicatat oleh perangkat daerah secara berkala guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan program kegiatan.
7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh atasan langsung.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah serta peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

Tabel : 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Pemalang Hebat yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera.			
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur di BPKAD untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kompetensi dengan mengikutsertakan diklat dan seminar serta penyelenggaraan sosialisasi dan Bimtek pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Penggunaan hardware dan software yang compatible dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas, kompetensi, profesionalisme dan produktivitas kerja aparatur pada BPKAD dengan cara pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimtek/Sosialisasi/Diklat/Workshop/Seminar tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Meningkatkan kualitas dan mencukupi kuantitas kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna mendukung transparansi dan akuntabilitas

		<p>3. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses data keuangan dan aset daerah yang valid serta terwujudnya akuntabilitas Pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis Teknologi Informasi yang memadai.</p> <p>4. Meningkatkan kompetensi pengelola keuangan dan pengurus barang pada perangkat daerah agar tersaji data keuangan dan aset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>5. Mewujudkan sinergitas dan relevansi data laporan keuangan dan aset daerah SKPD dengan laporan keuangan dan aset daerah</p>	<p>pengelolaan keuangan dan aset daerah.</p> <p>3. Penggunaan dan pengembangan Teknologi Informasi dalam upaya memberikan pelayanan yang prima atas pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>4. Memfasilitasi pelaksanaan Bimtek dan pendampingan terhadap pengelola keuangan dan pengurus barang perangkat daerah.</p> <p>5. Melaksanakan rekonsiliasi data keuangan dan aset daerah yang dicatat oleh perangkat daerah secara berkala guna mewujudkan</p>
--	--	--	---

		<p>konsolidasi.</p> <p>6. Meningkatkan kinerja dan budaya kerja aparatur agar masyarakat dapat terlayani dengan baik;</p> <p>7. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam melaksanakan program kegiatan.</p> <p>8. Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan aset yang memadai.</p>	<p>akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.</p> <p>6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan program kegiatan.</p> <p>7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh atasan langsung.</p> <p>8. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah serta peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.</p>
--	--	--	--

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD. Sehingga pengertian Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/ jasa. Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu

tahun. Kegiatan yang disusun secara tahunan ini menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program yang berdimensi waktu 5 (lima) tahun.

Kegiatan BPKAD Kabupaten Pematang Jaya tergabung dalam 6 Program dan 72 Kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari 20 Kegiatan yaitu :

- 1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 1.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 1.5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 1.6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 1.8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.13. Penyediaan Makanan dan Minuman
- 1.14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke luar daerah
- 1.15. Penyediaan Jasa Keamanan

- 1.16. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah
- 1.17. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan
- 1.18. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan
- 1.19. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Kasda
- 1.20. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji PNS

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri dari 14 Kegiatan yaitu :

- 2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 2.2. Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor
- 2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 2.4. Pengadaan Meubeleur
- 2.5. Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya
- 2.6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 2.7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- 2.8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 2.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 2.10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 2.11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- 2.12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya
- 2.13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengelolaan Aset Daerah
- 2.14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Software dan Sistim Informasi

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

3.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terdiri dari 6 kegiatan yaitu :

4.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN)

4.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

4.3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4.4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi

4.5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasi

4.6. Penyusunan Rekonsiliasi Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

4.7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5. Program Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD

Terdiri dari 1 Kegiatan yaitu :

5.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran SKPD

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terdiri dari 28 kegiatan yaitu :

6.1. Penyusunan Standar Satuan Harga

6.2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

6.3. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

6.4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

- 6.5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
- 6.6. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
- 6.7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
- 6.8. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 6.9. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 6.10. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6.11. Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pematang
- 6.12. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS
- 6.13. Pembayaran PBB Aset/Barang Milik Daerah
- 6.14. Pendistribusian Barang Milik Daerah
- 6.15. Penetapan status Pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKBU dan RKPBU
- 6.16. Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah
- 6.17. Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD
- 6.18. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD
- 6.19. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah
- 6.20. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
- 6.21. Pengelolaan Kerugian Daerah
- 6.22. Sosialisasi/Peningkatan SDM/Pengurus Barang/SIMDA BMD

- 6.23. Pemantauan Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah
- 6.24. Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah
(Konsolidasi)
- 6.25. Pengelolaan Kas Daerah
- 6.26. Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum
Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS
- 6.27. Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Tidak Langsung
- 6.28. Penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan
- 6.29. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD oleh
SKPKD
- 6.30. Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran
Pembiayaan
- 6.31. Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung
- 6.32. Penyusunan Dokumen Penghentian Pembayaran Gaji
PNSD
- 6.33. Penyusunan Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji PNSD
- 6.34. Peningkatan Kompetensi Pengelola Aset Daerah
- 6.35. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
- 6.36. Penyusunan Laporan Realisasi Dana Bai Hasil Pajak dari
Propinsi dan LKT
- 6.37. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan PPKD,
Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan
- 6.38. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan anggaran
Kas

5.2. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya sebagaimana tercantum pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Indikator Program BPKAD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kerja Anggaran SKPD	$\frac{\text{Jml RKA yg disampaikan tepat waktu}}{\text{Jml seluruh RKA SKPD}} \times 100\%$	Bidang Anggaran
		Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Ketepatan waktu penyusunan Surat Penyediaan Dana	$\frac{\text{Jml SPD yg diterbitkan}}{\text{Jml kelompok Anggaran Kas yg telah ditetapkan}} \times 100\%$	Bidang Anggaran
	Ketepatan waktu penerbitan SP2D	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Ketepatan Waktu Pencairan Dana	$\frac{\text{Jml SP2D yg selesai diproses dan ditransfer dananya dari RKUD pd tahun berjalan}}{\text{Jml berkas SP2D yg diusulkan SKPD}} \times 100\%$	Bidang Perbendaharaan

	Pemanfaatan Aset Daerah	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Pengamanan Aset	Jml Tanah Milik Pemkab yang telah bersertifikat $\frac{\text{Jml keseluruhan Tanah Milik Pemkab}}{\text{X 100\%}}$	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
		Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Pemindahtanganan Aset	Jml Realisasi Pemindahtanganan Aset $\frac{\text{Jml usulan Pemindahtanganan Aset}}{\text{X 100\%}}$	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
		Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD	Bulan Maret tahun berikutnya (Tepat waktu= 100%)	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
	Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama	Minggu kedua bulan Juli Tahun berkenaan (Tepat waktu=100%)	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

	Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Ketepatan Waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Bulan Maret Tahun Berikutnya (Tepat waktu=100%)	Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
--	--	--	---	--	---	----------------------------------

5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD dan SKPKD. Pendanaan indikatif program dan Kegiatan di BPKAD Kabupaten Pemalang seluruhnya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tercantum pada tabel 5.2 berikut :

Tabel : 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pemalang

(dalam ribuan rupiah)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluarga Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
								BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				19.588.000	13.888.618	9.898.700	16.238.000	4.207.000	14.207.000	4.207.000									
				4	04			Urusan Penunjang urusan Pemerintahan				19.588.000	13.888.618	9.898.700	16.238.000	4.207.000	14.207.000	4.207.000									
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Keuangan	Tingkat Penguasaan dan Kepuasan Pengguna	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan		4	04	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi kebutuhan administrasi perkantoran	bln	12	2.627.000	12	2.288.279	12	3.219.000	12	3.840.000	12	2.832.000	12	2.832.000	12	2.832.000			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
								Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)		Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
								target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
dan Aset Daerah	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan dan Aset Daerah						setiap bulan																		
				4	04	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Surat / notdian	10.000	37,000	10.000	30.300	7.700	40.000	8.000	45.000	7.800	50.000	7.800	50.000	7.800	50.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan kebutuhan komunikasi, air, listrik dan internet dalam satu tahun	Jenis	4	492,000	4	383.550	4	550,000	4	610,000	4	610,000	4	610,000	4	610.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	1	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terasurnya kendaraan dinas roda empat dan alat berat dalam	Unit	210	443,000	205	317,000	210	325.000	185	830,000	155	830,000	155	830,000	155	830,000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi					
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
									kegiatan, data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui media sosial																		
				4	04	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Kantor selama satu tahun	orang	4	55.000	4	86.750	4	85.000	4	95.000	4	105.000	4	105.000	4	105.000	BPKAD	Kab. Pml	
				4	04	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Unit	10	25.000	10	15.000	10	20.000	10	25.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	BPKAD	Kab. Pml	
				4	04	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenia	11	90.000	11	92.000	11	100.000	11	100.000	11	105.000	11	105.000	11	105.000	BPKAD	Kab. Pml	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
				4	04	1	11	Penyediaan brg cetakan & pengandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak	Jenis	30	57,000	30	50,000	30	155,000	30	60,000	30	70,000	30	70,000	30	70,000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor selama satu tahun	Kali	12	30,000	12	14,500	12	20,000	12	25,000	12	30,000	12	30,000	60	30,000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	1	13	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Jenis	4	68,000	4	109,600	4	45,000	4	55,000	4	65,000	4	65,000	4	65,000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan (surat	Jenis	2	27,000	2	16,600	2	35,000	2	40,000	2	45,000	2	45,000	2	45,000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi					
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
								perundang-undangan	kabar, majalah & buku perundang-undangan)																		
				4	04	1	17	Penyediaan makanan & minuman	Terlaksananya Penyediaan kebutuhan makanan & minuman pegawai selama satu tahun	Jenis	4	155,000	4	100.600	4	140.000	4	145,000	4	150,000	4	150,000	4	150,000	BPKAD	Kab. Pml	
				4	04	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah maupun ke dalam daerah selama satu tahun	Jenis	2	405,000	2	281.776	2	583.000	2	450,000	2	450,000	2	450,000	2	450.000	BPKAD	Kab. Pml	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi						
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23		
				4	04	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Tersedianya jasa Keamanan Kantor	orang	2	15,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	1	21	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah	Tersusunnya Laporan realisasi penerimaan dana transfer daerah dari Pusat selama satu tahun Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi hasil dari Propinsi selama satu tahun	Laporan	24	62,000	24	73.962	24	110.000	24	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
								Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)		Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
								target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)					
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
				4	04	1	22	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Tersusunnya laporan realisasi penerimaan PPKD Tersusunnya Laporan Realisasi Belanja Langsung PPKD Tersusunnya Laporan Penyaluran dana dari RKUD ke RKD Terlaksananya Verifikasi berkas pencairan Belanja tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan	Laporan, berkas	1.000	105,000	1.000	122.012	1000	326.000	1.000	350,000	0	0	0	0	0	0	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi					
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
				4	04	1	23	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan perbenahan	Terlaksananya penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung selama satu tahun	SP2D	10.000	327.000	8.000	319.937	8.500	325.000	1.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	1	24	Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan dana dan anggaran kas	Tersusunnya surat penyediaan dana dan Anggaran Kas perangkat daerah	SPD	250	69.000	175	81.650	175	85.000	175	95.000	0	0	0	0	0	0	0	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	1	27	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan Gaji PNS	Tersusunnya Dokumen Penghentian Pembayaran Gaji PNS selama satu tahun	SKPP	500	38.000	500	45.972	500	50.000	500	85.000	0	0	0	0	0	0	0	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
								Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)		Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
								target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tingkat Penguasaan Kepuasan Penggelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		4	04	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana dalam kondisi baik setiap bln	bln	12	12.115.000	12	6.757.833	12	7.800.000	12	1.905.000	12	1.780.000	12	1.785.000	12	1.785.000		
				4	04	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional selama satu tahun	unit	39	11.000.000	19	5.848.068	52	6.700.000	10	300.000	10	300.000	10	300.000	10	300.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gedung kantor selama satu tahun	unit	21	106.000	3	46.800	3	60.000	3	70.000	3	30.000	3	30.000	3	30.000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
								Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)		Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
								target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
				4	04	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor selama satu tahun	Unit	-	0	-	0	-	0	5	50.000	5	60.000	5	60.000	5	60.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	2	10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur selama satu tahun	Unit	10	30.000	1	31.900	23	50.000	17	50.000	15	50.000	15	50.000	15	50.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapan	Terlaksananya pengadaan komputer dan perlengkapan selama satu tahun	unit	24	235.000	33	301.800	25	200.000	9	250.000	10	300.000	10	300.000	10	300.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor selama satu tahun	unit	3	85.000	2	43.250	2	150.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
				4	04	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan mobil jabatan yg selama satu tahun	unit	1	39,000	1	32.020	1	40.000	1	50.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional selama satu tahun	unit	85	115,000	30	65.100	32	145.000	52	155.000	55	155.000	55	155.000	55	155.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama satu tahun	unit	40	36,000	30	38.095	33	40.000	33	45.000	33	50.000	33	50.000	33	50.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan	unit	2	18,000	1	17.140	1	20.000	1	25.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	BKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi						
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23		
								peralatan gedung kantor	gedung kantor selama satu tahun																			
				4	04	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya Pemeliharaan mebeleur selama satu tahun	Paket	1	5,000	-	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan komputer & perlengkapan lainnya selama satu tahun	unit	110	105,000	40	25.400	50	15.000	75	20.000	75	20.000	80	25.000	80	25.000	80	25.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	2	38	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengalasan aset daerah	Terlaksananya Pemeliharaan gedung milik Pemkab Pemalang selama setahun	unit	2	175,000	1	104.060	1	110.000	1	115.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	1	120.000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
				4	04	2	45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	Terlaksananya Pemeliharaan sistem informasi keuangan dan sistem informasi pengelolaan BMD yang terlaksana pemeliharaannya selama satu tahun	SIM	2	166,000	2	204.200	2	260.000	2	265.000	2	45.000	2	45.000	2	45.000	BPKAD	Kab. Pml
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tingkat Penguasaan dan Kepuasan Pengguna Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		4	04	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase SDM aparatur yg memiliki kompetensi	%	20%	210,000	40%	735.000	60%	100.000	80%	450.000	100%	450.000	100%	450.000		450.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi					
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
				4	04	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-an	Terlaksananya sosialisasi/diklat/seminar/workshop/Bimtek kepada SDM untuk peningkatan kompetensi	Org	124	210,000	204	735.000	10	100.000	75	450.000	85	450.000	85	450.000	85	450.000	BPKAD	Kab. Pml	
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tingkat Penguasaan dan Kepuasan Penggulaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		4	04	6		Program peningkatan kemampuan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan	Jml dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	%	20%	480.000	40%	471.445	60%	611.000	80%	889.000	100%	905.000	100%	905.000	905.000				
				4	04	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisa	Tersusunnya LKJIP Tersusunnya Perjanjian Kerja dan RKT	Dokumen	24	18,000	16	15.705	16	25.000	17	64.000	17	65.000	17	65.000	65.000	BPKAD	Kab. Pml		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)		Tahun 2021 (tahun 6)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
								realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya SAKIP BPKAD																		
				4	04	6	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Laporan keuangan semesteran perangkat daerah	Dokumen	2	15.000	2	16.485	2	20.000	2	25.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000	BPKAD	Kab. Pml	
				4	04	6	4	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah	Laporan	1	18.000	1	23.255	1	40.000	1	50.000	1	55.000	1	55.000	1	55.000	BPKAD	Kab. Pml	
				4	04	6	5	Penyusunan laporan keuangan semesteran konsolidasi	Tersusunnya laporan keuangan semesteran konsolidasi, Prognosis dan Laporan tugas pembantuan	Dokumen	2	97.000	2	76.000	2	100.000	2	110.000	2	115.000	2	115.000	2	115.000	BPKAD	Kab. Pml	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
										Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)		Tahun 2021 (tahun 6)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
										target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23		
							6																		
							n pelaksanaan APBD																		
							Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen, Laporan																	
					4	04	6	9		0	0	0	0	0	7	155.000	7	155.000	7	155.000	7	155.000	BPKAD	Kab. Pml	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening			Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)		Tahun 2021 (tahun 6)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
										target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
								n hasil TL LHP BPK Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik (emonev)																		
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tingkat Penguasaan Kepuasan Penggulaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		4	04	9	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Jenis dokumen perencanaan & penganggaran yang tersedia	%	20%	90.000	40%	129.587	60%	150.000	80%	160.000	100%	175.000	100%	175.000	100%	175.000			
				4	04	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersusunnya RKA-BPKAD/PPKD, RKAP-BPKAD/PPKD, DPA-BPKAD/PPKD, DPPA-BPKAD/PPKD selama	Dokumen	175	90.000	175	129.587	175	150.000	175	160.000	175	175.000	175	175.000	175	175.000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi			
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)		Tahun 2021 (tahun 6)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tingkat Penguasaan dan Kepuasan Pengguna Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		4	04	15		Program peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah	%	20%	4.066.000	40%	3.506.474	60%	4.712.000	80%	8.944.000	100%	9.905.000	100%	9.905.000	100%	9.905.000				
			Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD					Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kerja Anggaran SKPD	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			BPKAD	Kab Pml	
								Ketepatan waktu penyusunan Surat Penyediaan	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			BPKAD	Kab Pml	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
								Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)		Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD							
								target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)						
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
						Dana																					
			Ketepatan waktu penerbitan SP2D			Pencairan Dana Tepat Waktu	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD	Kab Pml
			Pemanfaatan Aset Daerah			Persentase pemanfaatan Aset	%	60%		62%		64%		66%		68%		70%		70%		70%		70%		BPKAD	Kab Pml
						Persentase Pemindahtanganan Aset	%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		BPKAD	Kab Pml
						Penyusunan Laporan BMD tepat waktu	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD	Kab Pml
			Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD			Ketepatan waktu penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD	Kab Pml
			Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK			Ketepatan waktu penyusunan	%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPKAD	Kab Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluarga Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23			
								unan Laporan Keuangan Daerah																		
				4	04	15	2	Penyusunan standar satuan harga	Dokumen	2	140.000	2	155.600	2	160.000	2	182.000	2	185.000	2	185.000	2	185.000	BPKAD	Kab. Pml	
				4	04	15	3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Perbup, Dok	2	55.000	2	90.500	2	115.000	2	125.000	2	135.000	2	135.000	2	135.000	BPKAD	Kab. Pml	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
				4	04	15	4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya Perbup tentang pedoman pelaksanaan APBD	Perbup	1	90.000	1	75.150	1	160.000	1	165.000	1	170.000	1	170.000	1	170.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Perda tentang APBD	Perda	1	370.000	1	380.000	1	400.000	1	400.000	1	410.000	1	410.000	1	410.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	7	Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati ttg penjabaran APBD yang tersusun beserta lampirannya	Perbup	1	80.000	1	70.000	1	100.000	1	105.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
				4	04	15	8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya perdatg Perubahan APBD	Perda	1	400.000	1	395.000	1	430.000	1	430.000	1	430.000	1	430.000	1	430.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	9	Penyusunan rancangan peraturan KDHTg Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD	Perbup	1	100.000	1	90.000	1	100.000	1	105.000	1	110.000	1	110.000	1	110.000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
				4	04	15	10	Penyusunan rancangan peraturan daerah ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Tersusunnya Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda	1	295.000	1	273.100	1	350.000	1	376.000	1	380.000	1	380.000	1	380.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	11	Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perbup ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta lampirannya	Perbup	1	37.000	1	36.000	1	45.000	1	50.000	1	65.000	1	65.000	1	65.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Keuangan	Kali	1	390.000	1	74.600	1	95.000	1	100.000	1	105.000	1	105.000	1	105.000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluarga Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
								Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)		Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD						
								target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
						Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Daerah																			
				4	04	15	16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pematang	Terlaksananya fasilitasi sertifikasi tanah milik Pemkab Pematang Terlaksananya pemasangan papan identitas tanah milik Pemda Pematang	Bidang, unit	130	300.000	205	211.000	155	250.000	140	255.000	140	260.000	140	260.000	140	260.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	20	Penyusunan Sistem Informasi Pengolaan Gaji PNS	Tersusunnya dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD Kab Pematang	Dokumen	12.400	377.000	12.400	414.100	12.400	400.000	2.400	410.000	-	0	-	0	-	0	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi					
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
									ng																		
				4	04	15	21	Pembayaran PBB Aset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembayaran PBB atas Tanah milik Pemkab Pemalang	Bidang	150	33,000	150	40.850	100	40.000	78	45.000	80	50.000	80	50.000	80	50.000	BPKAD	Kab. Pml	
				4	04	15	22	Pendistribusian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pendistribusian BMD selama satu tahun	Kali	4	20,000	4	16.150	4	20.000	4	25.000	4	30.000	4	30.000	4	30.000	BPKAD	Kab. Pml	
				4	04	15	23	Penetapan Status Pengguna BMD, SK Penguas Baran g, RKB U dan RKPBU	Tersusunnya keputusan bupati tentang pengurusan barang Tersusunnya RKB U/ RKPBU/ perangkat	SK, dok	4	140,000	4	88.350	4	115.000	4	125.000	4	135.000	4	135.000	4	135.000	BPKAD	Kab. Pml	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluarga / Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)		Tahun 2021 (tahun 6)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
				4	04	15	24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan semesteran BMD BPKAD	Laporan	2	551.000	2	7.055	2	12.000	2	35.000	2	35.000	2	35.000	2	35.000	BPKAD	Kab. Pml	
				4	04	15	25	Penyelaksanaan Peminangan dan penghapusan BMD	Terlaksananya Proses penghapusan BMD selama satu tahun	Kali	4	155,000	4	100.200	4	90.000	4	95.000	4	150.000	4	150.000	4	150.000	BPKAD	Kab. Pml	
				4	04	15	26	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKA	Tersusunnya laporan realisasi penerimaan BPKAD	laporan	12	87,000	12	66.982	12	80.000	12	90.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	BPKAD	Kab. Pml	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi						
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23		
								D																				
				4	04	15	27	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendanaan Daerah Pengeluaran Dana Perimbangan	Tersusunnya Laporan Mutasi Deposito dan Hasil Koordinasi pengelolaan kasda	laporan	24	51,000	15	58,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
				4	04	15	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah Tersusunnya buku saku petunjuk manual pengoperasian SIMDA Keuangan	Perbup, buku	2	31,000	2	67.400	2	123.000	2	136.000	2	140.000	2	140.000	2	140.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	35	Peningkatan kapasitas aparat pengelola keuangan daerah	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan fasilitasi tata kelola keuangan daerah kepada perangkat daerah dan tersusunnya	Laporan	100	79,000	100	103.000	50	120.000	50	120.000	50	120.000	50	120.000	50	120.000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi						
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23		
				4	04	15	54	Pengelolaan Kerugian Daerah	laporan		3	40,000	4	70.732	4	75.000	4	90.000	4	90.000	4	90.000	4	90.000	4	90.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	55	Sosialisasi/Peningkatan SDM/Pengurus Barang/SIM DA BMD	Kali		1	120,000	2	314.400	2	300.000	3	310.000	-	0	-	0	-	0	-	0	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluarga Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
				4	04	15	56	Pemanfaatan Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya kegiatan pemantauan pemanfaatan BMD dan tersusunnya laporan hasil pemantauan pemanfaatan BMD dalam satu tahun	Laporan	24	50.000	24	59.000	24	110.000	24	120.000	24	120.000	24	120.000	24	120.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	57	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah (Konsolidasi)	Tersusunnya Laporan semesteran BMD (konsolidasian)	Laporan	1	55.000	1	152.100	1	762.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	58	Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya Laporan Mutasi Deposito Tersusunnya	Laporan, dok	0	0	12	43.425	24	110.000	24	125.000	24	150.000	24	150.000	24	150.000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
								Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)		Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD							
								target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)						
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23	
						Laporan Hasil Koordinasi pengelolaan kas daerah																					
				4 04 15 59	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Tersusunnya Laporan Bahan Penyusunan KUA PPAS selama satu Tahun	Laporan	-	-	2	65.000	2	150.000	2	175.000	2	190.000	2	190.000	2	190.000	2	190.000	BPKAD	Kab. Pml		
				4 04 15 60	Penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Tidak Langsung	Tersusunnya Laporan Rancangan Anggaran Belanja Tidak Langsung selama satu tahun	Laporan	0	0	2	35.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPKAD	Kab. Pml		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluarga Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)		Tahun 2021 (tahun 6)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)		
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23		
				4	04	15	61	Penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	Tersusunnya Laporan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu tahun	Laporan	0	0	2	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	62	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional SKPD oleh SKPKD	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional roda empat SKPD oleh SKPKD	Unit	0	0	0	0	0	0	16	4.500.000	16	4.500.000	16	4.500.000	16	4.500.000	16	4.500.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	64	Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan	Terlaksananya penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan	SP2D	-	0	-	0	-	0	-	0	5000	350.000	5000	350.000	5000	350.000	5000	350.000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
				4	04	15	65	Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	Terlaksananya Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	SP2D	-	0	-	0	-	0	-	0	5000	400.000	5000	400.000	5000	400.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	66	Penyusunan Dokumen Penghentian Pembayaran Gaji PNSD	Tersusunnya Dokumen Penghentian Pembayaran Gaji PNSD	SKPP	-	0	-	0	-	0	-	0	500	85.000	500	85.000	500	85.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	67	Penyusunan Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji PNSD	Tersusunnya Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji PNSD	dok	-	0	-	0	-	0	-	0	12.400	50.000	12.400	50.000	2.400	50.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	68	Peningkatan Kompetensi Pengelola Aset Daerah	Terlaksananya Sosialisasi/Bintek kepada pengelola aset daerah	kali	-	0	-	0	-	0	-	0	2	250.000	2	250.000	2	250.000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluarga Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
				4	04	15	69	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	aplikasi	-	0	-	0	-	0	-	0	1	300.000	1	300.000	1	300.000	BPKAD	Kab. Pml
				4	04	15	70	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan LKT	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi, Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer dari Pusat	Laporan	-	0	-	0	-	0	-	0	24	30.000	24	30.000	24	30.000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
				4	04	15	71	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan PPKD, Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan PPKD dan Penerimaan Pembiayaan, Tersusunnya Laporan Realisasi Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan, Terverifikasi kasinya Berkas Pengajuan Pencairan Belanja Tidak Langsung PPKD	Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	2,800	50.000	2.800	50.000	2.800	50.000	BPKAD	Kab. Pml

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening				Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Sasaran Program / Keluaran Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
											Tahun 2016 (Tahun 1)		Tahun 2017 (Tahun 2)		Tahun 2018 (tahun 3)		Tahun 2019 (tahun 4)		Tahun 2020 (Tahun 5)				Tahun 2021 (tahun 6)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
											target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)	target	Rp (000)
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	23
				4	04	15	72	Penerbitan Surat Penyelesaian Dana (SPD) dan Anggaran Kas	Tersusunnya Surat Penyediaan Dana	Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	300	30.000	300	30.000	300	30.000	BPKAD	Kab. Pml

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif ataupun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan Kelompok Sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya yang secara langsung menunjukkan kinerja 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penetapan indikator kinerja akan digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana strategis, mengingat rencana kinerja merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana pada Tabel : 6.1 di bawah ini :

Tabel : 6.1
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
 Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2015	Target Kinerja Periode selanjutnya						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pemanfaatan Aset Daerah	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

BAB VII

PENUTUP

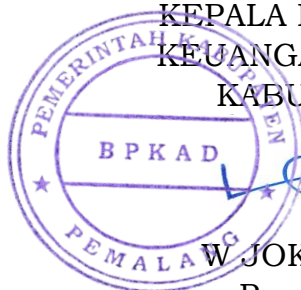
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016–2021 merupakan panduan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen perencanaan pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena dokumen ini merupakan pedoman/ panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja khususnya pengelola keuangan dan aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang pada masa mendatang.

Renstra merupakan dokumen yang digunakan sebagai panduan bagi perangkat daerah dapat dievaluasi dan dilakukan revisi agar selalu sesuai dan sinkron dengan kondisi perangkat daerah terkait. Revisi renstra dimaksudkan agar perangkat daerah lebih mampu menggali potensi dan memaksimalkandan sasaran Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang telah direvisi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BPKAD dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Pemalang, 8 Juni 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



W. JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661224 199203 1 005

